BAB II

DINAMIKA PERTANIAN INDONESIA

A. Makna Tanah Bagi Petani

Bagi petani tanah tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga bermakna sosial dan keamanan. Secara ekonomi tanah merupakan tempat sumber makanan, tempat mencari penghidupan, sebagai tempat melakukan aktivitas produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani.[1] Secara sosial tanah berarti eksistensi diri, sebagai tempat untuk menemukan dirinya secara utuh, bahkan tanah merupakan simbol status sosial di dalam masyarakat. Di dalam makna keamanan, tanah akan membawa rasa aman tertentu bagi petani jika sesuatu terjadi pada diri mereka, yang berarti tanah membawa efek psikologis bagi petani.

Tanah menempati kedudukan strategis dalam kehidupan petani, karena tanah merupakan modal utama, disanalah tempat atau pangkal dari budaya petani itu sendiri. Ketika kemudian tanah dapat dimiliki dan diwariskan oleh para petani, tanah memiliki nilai yang begitu besar. Didalam beberapa kebudayaan, tanah bahkan dipandang sebagai *sikep* (istri) kedua. Di dalam kasus gerakan petani yang ada pada era 1980an, memperlihatkan bahwa petani memberikan makna yang bersifat ideologis terhadap tanah. [2]

Petani mempertahankan tanah bukan hanya karena nilai komoditasnya, tetapi merupakan akumulasi dari nilai – nilai ideologis yang membentuknya. Petani tanpa tanah serasa bukan menjadi petani lagi, tanah merupakan warisan

---

[1] Lukman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif. (*Yogyakarta; Kanisus. 1995) hal 66-67

[2] Mukhlis. *Analisis Tanah Tanaman*. (Medan; USU Press. 2007) hal 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya (nilai sakral), tanah secara utuh merupakan gambaran eksistensi dari si petani itu sendiri. Pemaknaan petani terhadap tanah juga dapat dilihat dari pola kehidupan (*livelihood*) dari petani itu sendiri. di dalam segala aktivitas yang dilakukan petani di pedesaan seperti bercocok tanam, perburuhan, penjualan kayu, pertambangan, penyimpanan hasil produksi pertanian dan perdagangan kesemuanya berkaitan erat dengan tanah.[3]

Tanah merupakan bagian penting bagi petani. Karena tanah merupakan penopang kehidupan petani. Berkurang atau direbutnya tanah yang dimiliki petani akan membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya.[4] Kalau tanah sulit untuk didapatkan atau tidak cukup maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berkerja semakin keras atau mengintensifikasikan produksi pertanian. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanah bagi petani, seperti halnya tenaga kerja *(Labor)*, merupakan biaya tetap *(fixed cost)* yang menjadi aset mutlak agar petani bisa memenuhi kebutuhan subsistensi keluarganya.

Di dalam pandangan neo – populis, ukuran luas tanah minimal yang dapat dimiliki petani amat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *labor – consumer balance* yaitu petani bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, memperhitungkan efisiensi pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan jumlah anggota keluarganya.[5]

Petani tidak dapat ditempatkan pada pilihan yang dikotomis di dalam pemaknaan mereka terhadap tanah. Tanah bagi petani memiliki makna yang

[3] Lukman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif.* hal 68
[4] *Ibid.*
[5] Mukhlis. *Analisis Tanah Tanaman*. hal 34-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara sosial tanah dapat menetukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah – masalah *transcendental*.[6]

Banyaknya aspek yang saling memiliki keterkaitan dengan tanah semakin menegaskan pentingnya tanah bagi manusia. Bahkan begitu tingginya penghargaan tanah bagi masyarakat jawa hingga muncul sebuah teologi "*sedumuk bathuk, senyari bumi ditohi tekaning pati"* yang artinya persoalan tanah walau hanya sejengkal, taruhanya adalah nyawa. Persoalan yang muncul pada hak atas tanah bukan hanya sebatas kepemiikan secara material belaka. Sebab, bagi sebagian besar masyarakat, tanah merupakan bagian dari sebuah kehormatan, tanah juga mempunyai ikatan emosional dengan masyarakat. Tanah merupakan tempat dimana manusia berada dan hidup. Tanah menjadi tempat manusia untuk mengada dan menegaskan jati dirinya. Sehingga, maklum ketika banyak manusia saling bersengketa tentang tanah.[7] Karena ada yang membenarkan tentang teologisnya "*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, 'Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah'"*[8]

Sebagai anugrah Tuhan kepada manusia, ternyata tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal, atau sumber mencari nafkah semata. Lebih dari itu, tanah juga sebagai tempat "tumpah darah", "kampung halaman" yang keduanya tidak

[6] Lukman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif.* hal 75
[7] Mukhlis. *Analisis Tanah Tanaman*. hal 55-57
[8] Q.S. Hadi [38] : 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diragukan lagi mempu membangkitkan romantisme dan bahkan radikalisme seseorang atau komunitas sosial begitu rupa sehingga tidak jarang pula menjadi medan konflik dan perjuangan manakala dirasa ada gangguan datang dari luar.[9]

B. Pembangunan Pertanian Pasca Kemerdekaan

Di masa Orde Baru, pembangunan pertanian diletakkan pada skala prioritas teratas Pertanian telah dijadikan dasar pembangunan nasional yang menyuluruh. Disadari bahwa perkembangan pertanian merupakan prasyarat industrialisasi yang akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang tangguh. Konsep ini mengakhiri perdebatan dan pemikiran mengenai strategi pembangunan dan pemikiran mengenai strategi pembangunan di negara-negara berkembang. [10]

Negara-negara berkembang pada umumnya cenderung untuk "melompat" dalam strategi pembangunannya ke industrialisasi. Pemikiran seperti itu juga muncul di Indonesia pada awal tahun 1950-an yang dipelopori oleh DR Sumitro melalui "Sumitro Plan". Pemikiran ini timbul dari hasil penelitian disertasinya, bahwa sektor pertanian di Indonesia tidak bisa diharapkan sebagai tumpuan pembangunan. Tumpuan harapan itu adalah sektor industri. Industri merupakan kunci kepada perkembangan ekonomi, karena sektor industri menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan sektor pertanian hanya memberikan *marginal rate of return* yang rendah. Dengan perkataan lain, jika pendapatan

[9] Mukhlis. *Analisis Tanah Tanaman*. *Hal 58*
[10] Sri Harjadi, *Jalan Simpang Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Artikel didownload pada tanggal 27-12-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat, maka bagian pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang industri meningkat, sedangkan untuk pertanian menurun.[11]

Pengalaman menunjukkan bahwa perkembangan pertanian itu lambat jika tidak stagnan. Lagi pula pembangunan pertanian itu tidak mudah karena hambatan kelembagaan, seperti misalnya terdapat pada sistem sewa tanah yang menyebabkan usaha tani skala kecil yang tidak mampu menjamin keamanan pada kepentingan petani individual. Namun pada tahun 1950-an itu timbul reaksi dari Mr Syafruddin Prawiranegara yang membela sektor pertanian. Ia pada dasarnya menganjurkan agar pembangunan ekonomi di Indonesia diawali dan didasari dengan pembangunan pertanian.[12]

Pertama, sektor pertanian untuk negara seperti Indonesia dapat dijadikan dan seharusnya menjadi basis industrialisasi. *Kedua*, sektor pertanian bisa menghasilkan bahan pangan yang sangat diperlukan oleh penduduk dan merupakan instrumen kebijakan stabilisasi harga dan penolak inflasi. *Ketiga*, dalam perdagangan dunia, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif di sektor perkebunan yang mampu menghasilkan devisa dalam jumlah besar sehingga mampu memperkuat neraca pembayaran. Atas dasar tiga alasan tersebut, maka bagi Syafruddin, industrialisasi di Indonesia tidak akan berhasil tanpa didahului dengan pembangunan pertanian.[13]

C. Pertanian Masa Orde Baru Indonesia

Pemenuhan pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, kebutuhan manusia akan pangan juga

[11] *Ibid*
[12] *Ibid*
[13] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat dimana kebutuhan sumber daya seperti tanah, air, tanaman dan hewan meningkat pula. Sementara itu jumlah "modal" sumber daya alam dan kondisi biologi di dunia adalah tetap. Rendahnya produktifitas hasil pertanian menjadi salah satu kendala tercapainya ketahanan pangan. Belum lagi tingginya alih fungsi lahan pertanian serta masih banyaknya petani yang kehilangan hasil pertanian saat melakukan panen.[14] Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar pertanian di Indonesia masih bergantung pada input eksternal sebagai konsekuensi revolusi hijau yang dicetuskan pada tahun 1960-an sebagai upaya menaikkan produksi pangan.

Gambar 2.1

Revolusi Pertanian di Indonesia[15]

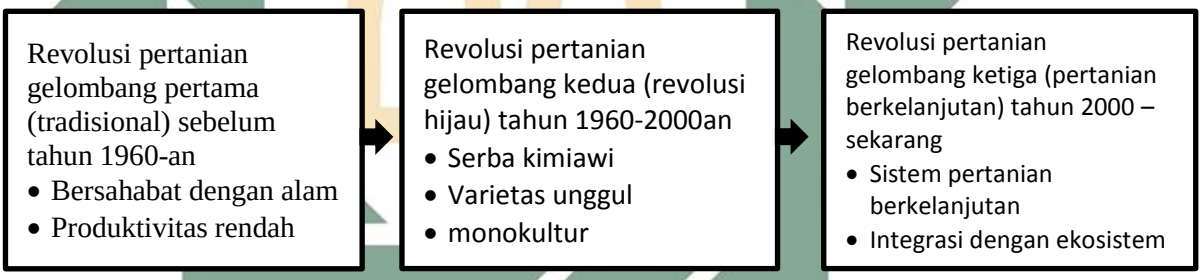

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar diatas menurut Pranadji dan Saptana sejarah pertanian di Indonesia mengalami tiga periode revolusi. Revolusi pertanian gelombang pertama identik dengan paktek-praktek pertanian yang masih tradisional dan alami. Kelemahan pertanian tradisional ini adalah rendahnya produktivitas.[16]

Pada era 1950-1960an negara-negara Asia, termasuk Indonesia mengalami krisis pangan yang gawat. Saat itu upaya mengatasi masalah kekurangan pangan

[14] Arif Rohman, *Education policy in decentralizion era* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) hal 75
[15] Tri Pranadji Dan Saptana , *Pengolalaan Serangga Dan Pertanian Organik Berkelanjutan Di Pedesaan: Menuju Revolusi Pertanian Gelombang Ke-3 Di Abad 21*.
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemiskinan merupakan hal yang mendesak dan dijadikan prioritas utama program pemerintah. Upaya mengatasi krisis pangan dilakukan dengan program Padi Sentra, yang merupakan awal revolusi hijau (*green revolution*) di Indonesia atau disebut revolusi pertanian gelombang kedua.[17] Saat itu, pemerintah mengkomando penanaman padi, pemaksaan pemakaian bibit impor, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lainnya, hingga pada tahun 1984-1989 Indonesia berhasil swasembada pangan. Namun pada dekade 1990-an, petani mulai kelimpungan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah yang merosot, ketergantungan pemakaian pupuk yang semakin meningkat dan pestisida tidak manjur lagi, serta harga gabah dikontrol pemerintah. [18]

Revolusi hijau bertumpu pada penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi, monokultur padi ganda untuk meningkatkan hasil panen tahunan, dan berbagai bentuk dukungan sektor publik sebagai perangsang petani (kredit lunak, subsidi besar, dukungan harga, penyediaan prasarana mahal). Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, tetapi tanpa disadari, hal ini justru menurunkan kesuburan tanah dan membuat hama menjadi resisten terhadap pestisida kimia tersebut. [19]

---

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan, dalam laporan WHO lebih dari satu juta ton bahan kimia untuk pertanian digunakan di seluruh dunia yang mengakibatkan lebih dari setengah juta manusia keracunan, dan 50.000 diantaranya meninggal dunia. Di samping itu, tumbuh pula kekhawatiran tentang pengaruh bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan usahatani pada keamanan dan kualitas pangan (*food safety and quality*), kesehatan manusia dan hewan, serta kualitas lingkungan. Revolusi hijau bahkan telah mengubah secara drastis hakekat petani.[20]

Dalam sejarah peradaban manusia, petani bekerja mengembangkan budaya tanam dengan memanfaatkan potensi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Petani merupakan komunitas mandiri, tetapi dengan pertanian konvensional, petani justru tidak mandiri. Petani menjadi tergantung terhadap ketersediaan pupuk kimia, pestisida dan benih serta sarana pertanian lain.[21]

Namun pembangunan pertanian di masa Orde Baru telah membawa beberapa hasil. *Pertama*, adalah peningkatan produksi, khususnya di sektor pangan yang berpuncak pada tahun 1984. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang relatif murah, memberikan kontribusi terhdadap proses industrialisasi dan urbanisasi yang membutuhkan pangan murah. *Kedua*, sektor pertanian telah meningkatkan pendapatan devisa disatu pihak dan penghematan devisa di lain pihak sehingga memperbaiki posisi neraca pembayaran Indonesia. *Ketiga*, pada tingkat tertentu sektor pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri sehingga melahirkan agroindustri. *Keempat*, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan lapisan bawah penduduk ikut

[20] Notohadiprawiro, *Tanah dan lingkungan, (*Jakarta*;* Depdikbud, 1998) Hal 121
[21] Tri Pranadji Dan Saptana , *Pengolalaan Serangga Dan Pertanian Organik Berkelanjutan Di Pedesaan: Menuju Revolusi Pertanian Gelombang Ke-3 Di Abad 21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu mengangkat penduduk dan kehidupan di bawah garis kemiskinan. *Kelima*, pendapatan yang meningkatdari lapisan menengah ke atas telah menciptakan potensi modal yang berasal dari tabungan pedesaan. [22]

Akan tetapi, pembangunan pertanian itu telah pula mengakibatkan perubahan struktural. *Pertama*, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB telah manurun dari 52 persen pada tahun 1961 menjadi 17 persen saja pada tahun 1996 dan 19 persen pada tahun 1998, ketika telah terjadi krisis. Penyerapan tenaga kerja pada periode yang sama juga telah turun dari 80 persen menjadi 44 persen dan45 persen setelah krisis. Dengan tingkat pendapatan yang meningkat rata-rata 4 persen pertahun, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 40,4 persen pada tahun 1966 menjadi 12,3 persen dari jumlah penduduk tahun 1996. [23]

Meskipun demikian, pembangunan pertanian itu mengandung sejumlah paradoks. Pertama, peningkatan produksi pertanian telah menimbulkan kecenderungan menurunnya harga produk-produk pertanian yang berakibat negatif pada pendapatan petani. Kedua, kenaikan produktivitas dan produksi tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani, bahkan pendapatan petani menurun. Ketiga, perkembangan ekonomi yang lebih maju khususnya karena dampak industrialisasi, menyebabkan menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB dan menyusutnya peranan relatif angkatan kerja sektor pertanian dalam lapangan kerja keseluruhan.[24]

---

[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masa Orde Baru, ternyata sektor pertanian hanya bisa berkembang dalam kebiksanaan yang protektif, memakan subsidi dan mendapat intervensi yang sangat mendalam, sehingga sektor pertanian dianggap sebagai sektor "terlalu banyak diatur". Dalam kecenderungan liberalisasi ekonomi dewasa ini, sektor pertanian menghadapi sejumlah sejumlah masalah, menghadapi tuntutan pembebasan dari subsidi, proteksi dan intervensi pemerintah. Mungkin karena kurang berhasilnya pembangunan pertanian, dewasa ini dalam persaingan global, ternyata sektor pertanian Indonesia Nampak kurang kompetitif sebagaimana dicerminkan dari masih lebih tingginya harga beras dan gula dari produk yang sama dari negara-negara lain. Sungguhpun begitu, ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis tahun 197/98, ternyata sektor pertanian justru yang relatif mampu bertahan. Ketika sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian masih mapu bertahan pada pertumbuhan positif, walaupun pada tingkat yang rendah yakni 0,4 pesen. Lebih dari itu sektor pertanian, khususnya yang berorientasi pada pasar ekspor justru mengalami perkembangan (booming), karena insentif nilai tukar yang meningkatkan penerimaan rupiah dalam nilai dollar hasil ekspor yang sama atau lebih besar.[25]

D. Pertanian Pada Masa Reformasi Indonesia

Di Indonesia, pengakuan akan pentingnya pengembangan pertanian organik telah dituangkan dalam Revitalisasi Pembangunan Pertanian yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Agustus 2005. Pemerintah melalui Departemen Pertanian mencanangkan program

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian organik dengan slogan “Go Organic 2010”. Pertanian organik dirancang pengembangannya dalam enam tahapan mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2010.[26] Tahapan tersebut dijelaskan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2

Tahapan Pengembangan Pertanian Organik pada Go Organik 2010[27]

Namun, program yang mendukung pelaksanaan pertanian organik ini bisa dipastikan tidak dapat mencapai target. Pendapat ini didukung pernyataan dalam sebuah artikel yang dimuat tabloid Swatani (Swatani, 2010) setidaknya, ketika seseorang membaca nama program "Indonesia Go Organik 2010" – pikirannya pada tahun 2010, Indonesia Go Organik sudah tercapai. Tinggal peningkatan dan

[26] Tino Mutiarawati. *Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di Indonesia*. (Jakarta; Penebar Swadaya. 2006) hal 66
[27] *Ibid.*, Hal 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perluasan. Namun hingga saat ini, banyak pihak menilai hasilnya belum sesuai harapan. [28]

Faktor yang menyebabkan kegagalan program ini adalah rendahnya kesadaran petani dalam pemakaian pupuk organik dan jumlah produksi pupuk organik nasional rendah, penyebab gagalnya program ini adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap pertanian organik dalam Dokumen Pembangunan Pertanian 2005-2009, ditambah dengan kecilnya subsidi pupuk organik dalam APBN 2008 sebesar 20 milyar (sebagai perbandingan subsidi pupuk kimia sebesar 15,2 triliun).[29] Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep baik program pertanian organik yang dicanangkan pemerintah tidak diimbangi dengan langkah operasional yang konsisten.

Usaha tani dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sasaran produksi yaitu pertanian skala besar dimana sasarannya adalah agroindustri dan pasar ekspor dan pertanian skala kecil dimana sasarannya adalah konsumsi rumah tangga dan pasar domestik. Di dunia terdapat sekitar 400 juta pertanian skala kecil dan 20 juta pertanian skala besar. [30]

Dari 107,41 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Tetapi sebanyak 10,8 juta keluarga (52,7% dari total rumah tangga petani) merupakan petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0,5 ha pada tahun 1993

---

[28] *Ibid.*, hal 66
[29] *Pertanian Indonesia Dalam Angka Tahun 2010* (Badan Pusat Statistik)
[30] Tino Mutiarawati. *Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di Indonesia*. hal 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian meningkat menjadi 13.7 juta keluarga (56,5% dari total rumah tangga petani) pada tahun 2003. Rata-rata luasan usaha tani gurem juga terus mengecil dari 0,26 ha pada 1983 menjadi 0,17 ha pada 1993. [31]

Luas lahan usaha tani ini bisa terus mengecil karena fragmentasi kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian melalui pewarisan, hibah, jual beli, alih fungsi lahan dan lain-lain. *fenomena economic of scale* baru terjadi manakala usaha tani beroperasi pada skala kepemilikan atau penguasaan lahan lebih dari 1 ha. Melihat mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0.5 ha, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pemberdayaan petani gurem. Petani gurem merupakan kelompok yang paling rentan karena kondisi modal yang kecil, pendidikan rendah, ketergantungan terhadap ketersediaan input, ketidakberdayaan dalam menentukan harga komoditas di pasar, volume hasil komoditas rendah sehingga berimbas kepada rendahnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, banyak pihak mempercayai pertanian organik sebagai solusi ketidakmandirian petani dalam mengusahakan pertanian.[32]

Jika di zaman revolusi hijau petani sangat bergantung terhadap usaha hulu berupa input kimia, maka dengan pertanian organik, petani dapat mengusahakan sendiri input organik (pupuk dan pestisida) yang dibutuhkan menggunakan limbah produk pertanian dan tanaman obat. Dengan kata lain, petani dapat mengintegrasikan usaha tani dengan usaha hulu menciptakan kemandirian pertanian. Komoditas pertanian organik juga memiliki harga yang lebih tinggi dari

[31] *Pertanian Indonesia Dalam Angka Tahun 2010* (Badan Pusat Statistik)
[32] Tino Mutiarawati. *Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di Indonesia*. hal 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komoditas non-organik dengan peluang ekspor yang besar. Namun, jumlah petani yang menerapkan pertanian organik masih terbatas, hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi program pertanian organik, minimnya akses informasi petani terhadap teknologi pertanian terbaru, kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk pertanian konvensional, dan mentalitas petani dalam menghadapi teknologi baru. [33]

Petani yang menerapkan pertanian konvensional tidak memahami bahwa praktek pertanian yang mereka jalankan selama ini memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, dan petani enggan menerapkan pertanian yang lebih ramah lingkungan jika berimbas terhadap menurunnya pendapatan. Sementara selama proses peralihan dari pertanian konvensional ke organik, produktivitas tanah akan mengalami penurunan sementara, yang tentu saja akan menurunkan pendapatan petani. [34]

Hal ini membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan ekonomi petani selama masa peralihan yang hingga saat ini belum mendapat perhatian. Kendala lain penerapan pertanian organik adalah produk hasil pertanian yang mengacu kepada praktek pertanian organik mutlak memerlukan sertifikasi untuk mendapat label produk organik, sementara biaya sertifikasi tidak mampu dijangkau petani kecil. Hal ini tentu menyulitkan petani untuk sepenuhnya menerapkan pertanian organik.[35]

---

[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pertanian Sebagai Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan ekonomi yang memprioritaskan sektor pertanian yang dibarengi dengan kebijaksanaan industrialisasi di awal Orde Baru mengakhiri debat itu di Indonesia. Penjelasan dari selamatnya sektor pertanian dari krisis tahun 1997/1998 dan bahkan berubah menjadi lebih potensial itu adalah karena produk pertanian tidak begitu tergantung pada bahan baku impor, karena sektor pertanian tergolong ke dalam kategori *resources based sektor*. Dari situlah timbul gagasan agar pembangunan ekonomi Indonesia "menengok" lagi ke sektor pertanian, seolah-olah sektor pertanian telah mulai diabaikan karena sukses industrialisasi. [36]

Sektor petanian dilihat juga merupakan sektor yang potensial di pasar internasional. Lagi pula Indonesia memiliki keuanggulan komparatif di sektor pertanian. Lagi pula ada sektor-sektor yang belum dieksplorasi, misalnya sektor kelautan atau agroturisme. Demikian pula sektor pertanian justru telah menimbulkan harapan-harapan baru. Banyak saran agar pemerintah mulai serus menangani agroindustri. Di tingkat swasta telah timbul usul-usul investasi di bidang pertanian dan agrobisnis.

Kalangan pemerintah terdengar pula suara-suara yang senada. Namun kegiatan pemikiran ke arah itu belum Nampak juga. Barangkali ada semacam keraguan dan kegamangan untuk kembali ke sektor pertanian. Mungkin juga ada sementara kalangan yang kurang yakin terhadap masa depan pertanian. Salah satu buktinya adalah sikap perbankan yang sangat hati-hati untuk mengucurkan

---

[36] Tino Mutiarawati. *Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di Indonesia*. hal 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreditnya ke sektor pertanian. Sektor itu dianggap masih mengandung risiko tinggi karena banyaknya faktor ketidakpastian.

Kenyataannya memang timbul ironi, ketika harga gabah dan beras turun drastis di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga jika terpaksa menjual dengan harga pasar itu mereka akan mengalami kerugian. Sebelumnya karena alasan turunnya harga beras itu banyak petani di sentra prioduksi padi telah mengalihkan usahanya ke bidang lain. Misalnya perkebunan untuk pasar ekspor.

Menaggapi masalah petani itu, pemerintah malahan menyarankan petani untuk melakukan alih profesi. Sebenarnya alih profesi itu sudah lama terjadi. Menurut penelitian William Colier dewasa ini sudah ada rata-rata seriap orang dalam satu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian. Buruh tani juga semakin langka dan lebih banyak yang telah berumur karena buruh tani muda telah beralih profesi di luar pertanian atau di luar desa.[37]

Sebenarnya sektor pertanian memang menghadapi sejumlah masalah yang cukup krusial. Pertama-tama adalah masalah sempitnya lahan pertanian. Rata-rata penguasaan lahan pertanian per-orang hanya sekitar 0,3 hektar. Sempitnya lahan pertanian ini diperparah dengan kecenderungan konversi lahan pertanian tersubur untuk pemakaian lain, khususnya di Jawa yang mengalami urbanisasi dan industrialisasi. Dengan lahan sesempit itu akan sulit ditingkatkan efisiensi produksi dan pendapatan total petani menjadi terbatas. Karena itu maka masalah "kelaparan tanah" ini perlu diatasi sehingga luas tanah yang dikerjakan oleh setiap

[37] *Ibid.*, hal 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani meningkat, katakanlah minimum 0,5 hektar. Masalah ini tidak bisa diatasi hanya dengan reformasi agraria, khusunya redistribusi tanah, melainkan dibutuhkan suatu proses transformasi yang menyangkut industrialisasi, urbanisasi, migrasi, dan pembangunan pedesaan secara komprehensif.[38]

Kedua, masalah permodalan. Sudah lama disadari bahwa modernisasi pertanian membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Petani Indonesia pada umumnya belum memilki modal yang mencukupi yang beredar di tingkat desa. Pembentukan modal itu sendiri harus didahului dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) antara produk pertanian dengan produk barang dan jasa non-pertanian. Dengan perkataan lain, pembangunan pertanian itu sendiri yang akan menciptakan peluang pembentukan modal. Namun, pembangunan pertanian itu sendiri membutuhkn modal.

Pemerintah Orde Baru telah memecahkan masalah ini dengan pernyediaan kredit Bank Indonesia, yang disalurkan melalui sisterm perbankan, khususnya bank rakyat, yaitu fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tetapi sekarang, KLBI telah dicabut, sehinga pemerintah harus menyediaan anggaran dari APBN. Di lain pihak pemerintah berkecendrungan untuk mencabut semua jenis subsidi, sehingga pada akhirnya petani harus bisa mengharapkan dari sektor perbangkan umum untuk mendapatkan kredit dengan tingkat bunga pasar. Dengan ketidaksiapan sektor perbankan yang masih tenggelam dalam krisis dan baru dalam proses penyehatan itu, maka modal untuk sektor pertanian sangat langka.

[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa modal yang memadai petani tidak mungkin berpoduksi. Masalah ketiga adalah teknologi. [39]

Di masa Oede Baru, pemerintah telah mempeluas penggunaan teknologi modern lewat program Pabca Usaha Tani. Hasilnya adalah peningkatan produksi pada per hektar. Namun ternyata tingkat produktivitas itu baru mencapai 4,0 ton per hektar. Tingkat ini lebih rendah dari tingkat peroduktivitas yang dicapai oleh negera-negara lain yang bahkan bisa mencapai di atas 8,0 ton per hektar. Selain itu, biaya produksi pertanian, khususnya padi, masih cukup tinggi, sehingga beras Indonesia masih belum bisa bersaing dengan beras dari negara lain. Hingga sekarang Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand, AS, Vietnam, dan sedikit dari Jepang yang berkualitas tinggi. Dari segi efisiensi, terlihat kecenderungan rasio penerimaan petani dibanding pupuk yang semakin kecil. Kecenderungan ini disebabkan di satu pihak merosotnya harga beras dan di lain pihak meningkatnya harga pupuk dan input produksi pertanian yang lain. Menjadi pertanyaan mengapa Indonesia yang mempunyai bahan baku pupuk yang melimpah justru belum mampu memproduksi pupuk yang murah dan berkualitas tinggi.

masalah pemasaran dan harga hasil-hasil pertanian yang cenderung turun dan megalami fluktuasi di pasaran dunia. Dua faktor yang menyebabkan kecenderungan ini. Pertama, hasil pertanian itu tidak tahan lama, bahkan mudah rusak, karena itu tidak bisa bisa disimpan lama tanpa teknologi pengawetan dan sulit dijual di tempat yang jauh. Kedua, produk pertanian bersifat musiman dalam

[39] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu-waktu tertentu dalam waktu serempak, karena itu kalau terjadi panen, pasok melimpah dan harga akan turun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Sebenarnya dengan teknologi pengolahan hasil pertanian bisa lebih tahan lama dan meningkat nilai tambahnya. Tetapi industri pengolahan itu menginginkan harga yang murah dan dalam jumlah yang besar. Meskipun begitu tetap saja, produk pertanian itu mengalami masalah pemasaran. Dalam kenyataannya, pemasaran produk pertanian seperti beras, gula atau buah-buahan, membutuhkan tata niaga yang dilaksanakan oleh suatu lembaga stabilisator harga. Dengan krisis penyediaan beras sekarang ini maka terbukti bahwa produksi dan pemasaran produk pertanian masih mengalami masalah tanpa intervensi pemerintah, padahal kecenderungan liberalisasi pemerintah menginginkan dicabutnya intervensi pemerintah. Pengembangan sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi, termasuk teknologi biologis dan mekanis untuk mengolah hasil-hasil pertanian.

Dewasa ini, dalam riset pertanian, Indonesia boleh dikatakan ketinggalan dibanding dengan yang telah berkembang di Taiwan atau Thailand. Penelitian pertanian ini banyak membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang besar. Juga memakan tempo yang lama, sehingga disangsikan apakah perkembangan teknologi sekarang ini mampu mengejar ketertinggalan teknologi dari negara-negara lain.[40]

[40] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani di Dusun Beton Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagian besar merupakan petani gurem dengan luas lahan kurang dari satu Ha yang secara ekonomi tidak menguntungkan. Mayoritas penduduk di Dusun Beton yang saat ini berprofesi sebagai petani memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu SD, baik tamat maupun tidak. Komoditas yang dihasilkan adalah padi, tembakau dan bawang merah.

Mayoritas petani melaksanakan praktek pertanian konvensional dengan input kimia tinggi. Terdapat sugesti di kalangan petani bahwa hasil panen tidak akan baik jika tidak menggunakan pupuk kimia. Selain ketergantungan terhadap pupuk kimia, petani juga rutin menyemprotkan pestisida untuk mencegah serangan hama. Petani di Dusun Beton seperti halnya di daerah lain, tidak berdaya dalam menentukan harga produk pertanian, sehingga seringkali pendapatan dalam satu kali masa panen hanya cukup untuk menutup biaya produksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id